

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada tahun 1998 Indonesia mengalami sebuah perubahan yang signifikan yakni menuju reformasi. Reformasi telah membawa perubahan yang sangat berarti bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Diantara perubahan yang paling fundamental yakni mulai terbukanya ruang publik, serta terdapat tuntutan daerah untuk ikut andil dalam pengelolaan daerahnya atau yang sering disebut dengan istilah desentralisasi atau pelimpahan kekuasaan dari pusat kepada daerah.

Desentralisasi merupakan sebuah terobosan baru bagi sistem politik di Indonesia. Hal yang paling menonjol dari desentralisasi yakni tumbuhnya praktik oligarki yang menyebar sampai ke daerah. Pasca pemerintahan Soeharto, demokrasi dimanfaatkan oleh para oligark untuk beradaptasi dengan prosedural yang baru dengan memanfaatkan pemilihan umum, partai politik, parlemen, serta desentralisasi. Di dalam politik lokal, para oligark sering disebut juga dengan sebutan “orang kuat lokal (*local strongman*)” yang menurut Migdal berarti segelintir elit kuat lokal yang memiliki kekuasaan dominan melebihi para pejabat politik di pemerintahan.

Para elit kuat lokal tersebut memiliki sumber daya dan jaringan politik yang kuat untuk memperebutkan kendali sosial-politik di pemerintahan ataupun di dalam masyarakat. Setelah runtuhnya Orde Baru dan munculnya reformasi, para oligark ini saling berkompetisi untuk memperebutkan serta menguasai daerah yang tidak lagi dipegang oleh pusat. (Hadiz, 2005). Dalam beberapa kasus, mereka saling

bersaing dengan sengit yang tidak terlepas dari kepentingannya untuk mengumpulkan dan meraup kekayaan sebanyak-banyaknya harta kekayaan demi menunjang kehidupan mereka dan mengesampingkan kepentingan rakyat.

Dari beberapa riset yang menjadi referensi, salah satunya ditulis oleh Hidayat, dkk (2019) yang berisi tentang keterlibatan pengusaha dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Kediri terlihat dalam proses kampanye, sosialisasi, serta berbagai upaya dalam menarik dukungan warga. Masyarakat memberikan pengakuan bahwa tanpa adanya campur tangan para pengusaha khususnya kelompok oligarki akan terasa sulit untuk mendapat dukungan warga desa. Kepala desa yang terpilih memberikan imbalan atas hak tanah bengkok dan pengelolaan dana desa. Hal tersebut menjadi faktor pendukung untuk meraih kemenangan menjadi kepala desa.

Penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan praktik politik oligarki yakni ditulis oleh Rizki (2021). Penelitian ini berisi tentang oligarki dalam pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2020 dapat dikatakan sebagai sebuah sistem oligarki yang sudah dirancang sedemikian rupa oleh sebuah perusahaan yakni Mayasari Grup. Ada empat calon kandidat yang terlibat dalam pilkada di Kabupaten Tasikmalaya yang keempatnya memiliki latar belakang yang berbeda. Terdapat satu calon yang memiliki latar belakang pengusaha. Sosok Azies Rismaya Mahpud merupakan seorang pengusaha yang berasal dari keluarga Mayasari Grup yang merupakan perusahaan terbesar yang ada di Tasikmalaya dan sudah menyasar sampai ke tatanan nasional. Keterlibatan oligarki tersebut merupakan sebuah cara untuk tetap mempertahankan oligarki perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut bertindak

sebagai patron-klien, dimana mereka berada dalam posisi untuk membantu para klien.

Berdasarkan riset tersebut telah membuktikan pada pengaruh oligarki dalam dunia politik masih saja terjadi meskipun saat ini Indonesia menganut sistem demokrasi yang berarti sistem pemerintahan oleh, dari, dan untuk rakyat. Salahsatu implementasi dari demokrasi yakni adanya sebuah pemilihan umum. Wolhoff mendefinisikan pemilihan umum sebagai sebuah mekanisme untuk memilih wakil rakyat yang akan menjalankan pemerintahan yang di mandatkan oleh masyarakat. (Jurdi, 2018)

Sebagai suatu perwujudan dari demokrasi maka pemilihan kepala desa atau sering disebut Pilkades bukan lagi sesuatu hal yang baru didalam kehidupan desa. Dalam kehidupan desa telah terjadi kehidupan yang demokratis yang dapat dilihat dari adanya demokratisasi desa yakni terjadinya musyawarah desa, pemilihan kepala desa, penetapan kebijakan desa, proses kepemimpinan desa, berkembangnya situasi yang kemudian melahirkan elit-elit politik desa.

Pemilihan Kepala Desa merupakan wujud dari terlaksanakannya Otonomi Daerah yang sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang berada di ranah pemerintahan terendah yaitu desa. Pilkades bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi yang ada pada setiap warga Indonesia. Kepala desa dipilih oleh rakyat karena kepala desa bukanlah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Gaji kepala desa yang diterima berasal dari kas yang dimiliki desa. Sedangkan Lurah diangkat langsung oleh Bupati atau Walikota karena Lurah adalah seorang Pegawai Negeri

Sipil (PNS). Kelurahan sering disebut memiliki kesamaan dengan desa, tetapi pada dasarnya kelurahan merupakan lembaga sekelas desa yang keberadaannya sudah lebih maju baik dari segi ekonomi atau segi fasilitas umum. (Priyatna, Riswanda, dkk, 2009).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa pasal 21 menyebutkan bahwa kepala desa di Indonesia minimal harus berusia 25 tahun saat mencalonkan diri. Berdasarkan hasil survey peneliti dari beberapa desa yang ada di Kabupaten Tasikmalaya pada saat ini, khususnya di wilayah Tasik Selatan kepala desa rata-rata berusia diatas 35 tahun. Tetapi, tidak jarang juga ada kepala desa yang berusia dibawah 35 tahun salah satunya kepala desa di Desa Hegarwangi Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya. Saat ini Kepala Desa Hegarwangi berusia 33 tahun, ia menjabat sejak tahun 2019-2025. Kepala desa Hegarwangi telah mengalahkan empat orang calon yang memiliki usia lebih tua.

Tabel 1.1
Perolehan suara Pemilihan Kepala Desa tahun 2019

Nomor dan Nama Calon Kepala Desa	Bilik Suara Per Dusun					Jumlah
	Malingping	Cisegel	Bantarwaru	Hegarwangi	Karang Sari	
Solehudin (No Urut 01)	31	80	56	23	302	492
Cepi Nuriman (No Urut 02)	59	147	68	52	156	482
M. Taufan F (No Urut 03)	226	208	157	230	65	886
Rahmat (Nomor Urut 04)	14	48	74	133	15	284

Agus Solihat (No Urut 05)	28	37	59	55	230	409
Jumlah Perolehan Suara Sah Seluruh Calon	358	520	414	493	768	2553
Jumlah Suara Tidak Sah	–	4	1	3	5	13
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	358	524	415	496	773	2566

Sumber : BPD Desa Hegarwangi

Dari tabel perolehan suara dapat dilihat bahwa perolehan suara kepala desa yang sekarang menjabat jauh lebih banyak dibandingkan calon yang lainnya yakni sebanyak delapan ratus delapan puluh enam (886) suara dari lima dusun. Perolehan suara tersebut tidak semata-mata unggul tetapi dengan dibarengi oleh proses sebelum pemilihan, yakni proses kampanye. Semua calon kepala desa serentak melakukan kampanye tidak terkecuali kepala desa yang sekarang menjabat. Kampanye merupakan sebuah cara yang digunakan oleh calon dan tim pemenangan yang bertujuan untuk mengenalkan serta menjalin hubungan antara calon dan pemilih.

Kepala Desa yang saat ini menjabat melakukan kampanye dengan memilih orang-orang tertentu untuk menjadi ketua dari tim sukses nya. Beliau juga memegang dua daerah/kedusunan yang dianggap akan menghasilkan lebih banyak suara. Biaya kampanye yang dikeluarkan kurang lebih dua ratus sampai dua ratus lima puluh juta rupiah yang sebagian besar digunakan untuk kepentingan organisasi

masyarakat seperti karang taruna dan Dewan Keamanan Mesjid (DKM) dana tersebut berasal dari keluarganya. Dalam hal kampanye tidak ada bentuk paksaan, tetapi lebih kepada bentuk ajakan. (Hasil dari wawancara dengan salahsatu tim sukses kepala desa yang sedang menjabat pada tanggal 25 Desember 2021 di rumahnya). Kepala desa yang menang memiliki visi dan misi, yakni "*Hegarwangi sejahtera, juara, kemandirian*" yang disingkat *HEGARWANGI SEJUK*. Kepala Desa yang saat ini menjabat masih memiliki usia muda dinilai memiliki semangat dan motivasi yang kuat untuk menciptakan perubahan, akan tetapi itu tidak cukup menjadi acuan dalam mengembangkan pemerintahan desa.

Sedangkan, salahsatu pesaingnya sama sekali tidak ada dukungan yang begitu kompleks dari keluarganya termasuk dukungan berbentuk materi. Beliau mengeluarkan biaya untuk kampanye kurang lebih tiga puluh juta rupiah dan itu murni uang beliau serta beliau juga hanya mengandalkan dukungan dari masyarakat serta tokoh masyarakat di lingkungan beliau tinggal. Beliau memiliki pikiran positif yang semata-mata untuk kemajuan daerah serta masyarakat. Jadi letak pembeda antara salahsatu pesaing dengan kepala desa yang sekarang menjabat yakni dalam hal harta kekayaan dan keluarga. (Hasil dari wawancara dengan salahsatu kompetitor kandidat kepala desa Hegarwangi pada tanggal 15 Juni 2022 di rumahnya)

Usia muda merupakan sebuah keberuntungan sekaligus tantangan yang dimiliki oleh Desa Hegarwangi. Desa Hegarwangi beruntung memiliki kepala Desa yang masih muda karena pola pikirnya lebih modern dan terbuka terutama terhadap masukan dari masyarakat dan sistem pemerintahan tidak akan *monoton* selain itu

juga berbagai kegiatan yang diadakan kemungkinan memiliki dampak yang baik bagi masyarakat khususnya bagi pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Selain itu, kepala desa yang berusia masih muda cenderung kurang tegas dalam memberikan perintah dan memiliki pola pikir yang kemungkinan akan mudah berubah terlebih jika ada masukan dari orang yang lebih dipercaya, sehingga hal ini dapat menjadi tantangan atau ancaman bagi kemajuan pemerintah dan wilayah Desa. Namun demikian, hal yang penting dari seorang kepala Desa adalah terkait maksimalnya kepala desa dalam menjalankan tugasnya.

Kepala Desa Hegarwangi saat ini memang belum memiliki pengalaman menjadi seorang pemimpin terlebih di usianya yang masih muda. Akan tetapi, beliau memiliki keluarga yang mendukung dan memotivasinya. Selain itu, keluarganya memiliki latarbelakang pekerjaan yang bergerak di bidang pemerintahan terutama kakeknya yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Hegarwangi dan memiliki jejak kepemimpinan yang baik. Sedangkan ayahnya, pernah mencalonkan diri sebagai wakil rakyat di tingkat daerah tetapi tidak berhasil. Selain memiliki latarbelakang keluarga yang bergerak di bidang pemerintahan, ada juga keluarganya yang menjadi seorang tenaga pendidik dengan status Pegawai Negeri Sipil serta ada pula beberapa keluarganya yang menjadi seorang pengusaha yang bergerak di bidang *property* dan jasa. Ini juga yang mungkin memengaruhi kemenangan Kepala Desa Hegarwangi.

Alasan keluarga memberikan dukungan penuh terhadap beliau yakni karena melihat kegigihan dan keyakinannya untuk mencalonkan diri jadi Kepala Desa. Selain itu juga, dengan ikut sertanya beliau dalam pemilihan Kepala Desa

merupakan suatu upaya untuk kembali memperkuat kekuasaan keluarga dalam bidang pemerintahan yang sebelumnya pernah dilakukan oleh ayah dan kakeknya. (Hasil dari wawancara dengan salahsatu warga Desa Hegarwangi pada tanggal 4 Januari 2022 di rumahnya).

Berdasarkan pada pra penelitian dengan melakukan wawancara, diperoleh informasi bahwa Kepala Desa Hegarwangi saat ini adalah yang paling muda dibandingkan dengan kepala desa yang menjabat sebelum-sebelumnya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa usia yang masih muda dan seorang pemimpin tentu akan ada sisi positif dan negatifnya serta bahkan cenderung akan dianggap tidak meyakinkan oleh masyarakat karena kurangnya pengalaman. Akan tetapi, dari kemenangan kepala desa tersebut ada pengaruh dari luar yang salah satunya disebabkan oleh praktik politik oligarki yang berkaitan dengan kekuasaan keluarga. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui mengenai lebih dalam mengenai “Kekuatan Oligarki Dalam Pemilihan Kepala Desa 2019 Di Desa Hegarwangi Kabupaten Tasikmalaya” dengan tujuan untuk mengetahui kekuatan oligarki yang terjadi dalam kemenangan Kepala Desa periode 2019-2025 di Desa Hegarwangi.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Kekuatan Oligarki dalam Pemenangan MTF Pada Pemilihan Kepala Desa 2019 Di Desa Hegarwangi Kabupaten Tasikmalaya?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan dan mengetahui siapa elit yang menjadi oligarki yang diciptakan dengan sumberdaya yang dimiliki oleh kepala desa terpilih mampu memenangkan pilkades
1. Ingin lebih mengetahui dan mendalami kajian oligarki yang diciptakan oleh keluarga kepala desa terpilih dalam mempertahankan kekuasaan dan kekayaan.
2. Sesuai dengan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini untuk mengetahui kekuatan oligarki yang terjadi dalam kemenangan Kepala Desa 2019 di Desa Hegarwangi Kabupaten Tasikmalaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang oligarki politik dan terkait pemilihan kepala Desa.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat berupa ilmu pengetahuan yang baru bagi penulis dan penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan oligarki politik.
- c. Masyarakat diharapkan dapat lebih berfikir rasional dalam memilih calon kandidat baik dalam Pemilihan Kepala Desa.

- d. Diharapkan penelitian ini mampu membuka wawasan masyarakat tentang kepala desa sehingga dapat meminimalisir terjadinya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
- e. Diharapkan penelitian ini mampu mewujudkan keterbukaan antara kepala desa dan perangkat desa.
- f. Penelitian ini setidaknya memberikan gambaran` bagaimana terciptanya *Good Governance* di lingkungan pemerintahan lokal.

1.4.2 Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini akan menambah pengetahuan bagi pembacanya serta memperkuat teori yang ada sebelumnya.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur tambahan serta informasi bagi para peneliti yang tertarik pada isu-isu politik lokal.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan langsung dengan oligarki politik.
- d. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan inovasi baru yang bertujuan untuk memperbaiki pemilihan kepala desa yang akan datang.